



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BATANG**

RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN 2025



**JALAN RA. KARTINI NOMOR 1 BATANG
TELP/FAX (0285) 4493224
JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Pada perjalanan implementasi Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Batang melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Batang mendapatkan rekomendasi berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 061/1423 tanggal 7 Desember 2023 Perihal Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, dimana pada huruf f disebutkan bahwa nama Badan Kepegawaian Daerah diubah mengikuti Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan menjadi "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", hal ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025. Pada Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 ini penyebutan nama perangkat daerah masih menggunakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang dan akan disesuaikan manakala Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait sudah disahkan.

Atas limpahan rahmat dan hidayah-NYA semata kepada kita semua, sehingga Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Renja ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 ini nantinya dapat memberikan gambaran dan kontribusi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2025.

Batang 8 Juli 2024
Kepala Badan Kepegawaian Daerah



DWI RIYANTO, A.P., M.M.
NIP. 197607101996021004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT (RENJA PD) TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Daerah sampai dengan Tahun 2023	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	28
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang	37
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD.	44
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	52
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.	55
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah (PD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.	66
3.3 Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Batang Tahun 2025	72
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.88	
BAB V PENUTUP.....100	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk

Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan tahun ketiga penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023- 2026 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 khususnya dalam rangka mendukung terwujudnya Tujuan ke-2 dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Batang yaitu :

Tujuan : "Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel"

Sasaran : " Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah" dan "Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)".

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Pada perjalanan implementasi Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Batang melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Batang mendapatkan rekomendasi berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 061/1423 tanggal 7 Desember 2023 Perihal Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, dimana pada huruf f disebutkan bahwa nama Badan Kepegawaian Daerah diubah mengikuti Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan menjadi "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", hal ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 dan selanjutnya Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan RENJA Perangkat Daerah (PD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 6 Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 tahun 2007 tentang Tata Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah

- (RPJPD) kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2007 Nomor 13 seri E nomor 7);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2019 Nomor 13);
 - u. Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2021 Nomor 115);
 - v. Peraturan Bupati Batang Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 12);
 - w. Peraturan Bupati Batang Batang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 16);

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, khususnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang;
2. Memberikan pedoman, gambaran, dan arah pembangunan bidang kepegawaian jangka pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 disusun dengan tujuan :

1. Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program, dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025;
2. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025;
3. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025.

1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD Kabupaten Batang, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang serta susunan garis besar isi

dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023.

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah (PD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang

Berisikan uraian mengenai :

1. Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

5. Formulasi dan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Batang.

Bagian ini menguraikan proses pembandingan Rancangan Akhir dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan :

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan sesuai yang tertuang dalam usulan Renstra 2023-2026.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023

Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang guna mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

Secara keseluruhan alokasi anggaran yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang tahun 2023 sebesar Rp. 8.023.017.410,- terealisasi sebesar Rp 7.613.689.805,- atau 94,90%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, dimana alokasi anggarannya sebesar Rp. 7.797.985.337,- terealisasi sebesar Rp 6.941.781.919,- atau 89,02%, maka realisasi anggaran tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,88%, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 dapat terlaksana dengan optimal kegiatan prioritas tusi kepegawaian dan diklat.

Realisasi keuangan dan capaian kinerja fisik kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1.a.
Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Fisik
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		%	Kinerja Fisik		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	Satuan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.781.404.400	4.609.296.025	96,4	100	100	%
	A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.323.306.050	3.185.360.435	95,85	100	100	%
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.299.846.050	3.161.900.435	95,82	100	100	%
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.460.000	23.460.000	100	12	12	dok
	B. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.999.000	99,99	100	100	%
	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.999.000	99,99	7	7	dok
	C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.822.950	222.468.534	96,38	200	200	ASN
	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33.435.400	32.103.750	96,02	70	70	ASN

	2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	197.387.550	190.364.784	96,44	160	160	ASN
	D. Administrasi Umum Perangkat Daerah	508.156.500	492.995.341	97,02	100	100	%
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.784.400	14.784.400	100	12	12	bulan
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187.476.500	177.955.450	94,92	12	12	bulan
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.420.000	91.202.500	99,76	12	12	bulan
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.856.300	41.171.250	93,88	12	12	bulan
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	7.810.000	86,78	100	100	%
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.619.300	160.071.741	99,04	12	12	bulan
	E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.063.900	421.329.438	97,97	100	100	%
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.113.000	1.850.000	87,55	12	12	bulan
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.280.000	186.459.976	97,48	12	12	bulan
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.000.000	52.937.500	99,88	12	12	bulan
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.670.900	180.081.962	98,05	100	100	%

	F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.055.000	272.143.277	99,3	100	100	%
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.820.000	181.721.577	99,4	24	24	unit
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.235.000	90.421.700	99,11	1	1	gedung
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.226.256.260	2.066.401.560	92,82	100	100	%
	A. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.036.614.220	966.923.085	93,28	100	100	%
	1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	41.462.000	35.673.318	86,04	1	1	dok
	2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	682.247.230	620.734.060	90,98	1588	1521	formasi
	3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	62.637.360	62.108.059	99,15	100	100	%
	4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	176.267.790	175.320.365	99,46	100	100	%
	5. Pengelolaan Data Kepegawaian	73.999.840	73.087.283	98,77	100	100	%
	B. Mutasi dan Promosi ASN	744.691.000	714.471.996	95,94	100	100	%
	1. Pengelolaan Mutasi ASN	26.620.000	25.911.304	97,34	100	100	%

	2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	23.000.000	22.971.000	99,87	100	100	%
	3. Pengelolaan Promosi ASN	695.071.000	665.589.692	95,76	100	100	%
	C. Pengembangan Kompetensi ASN	213.955.840	184.444.405	86,21	100	100	%
	1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	127.955.840	120.526.740	94,19	135	135	%
	2. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	86.000.000	63.917.665	74,32	220	220	%
	D. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	230.995.200	200.562.074	86,83	100	100	%
	1. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	24.220.000	22.652.678	93,53	340	340	ASN
	2. Pembinaan Disiplin ASN	116.565.200	114.536.396	98,26	5296	5296	ASN
	3. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	90.210.000	63.373.000	70,25	25	12	kasus
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.015.356.750	937.992.220	92,38	100	100	%
	A. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	195.941.750	169.251.667	86,38	41	41	ASN
	1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	195.941.750	169.251.667	86,38	4337	4337	ASN

	B. Sertifikasi, Pengembangan Manajerial dan Fungsional	Kelembagaan, Kompetensi	819.415.000	768.740.553	93,82	100	100	%
	1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		819.415.000	768.740.553	93,82	480	480	ASN
	JUMLAH		8.023.017.410	7.613.689.805	94,9			

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang tahun 2023 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang dapat dilihat pada **tabel 2.1.b. (T-C 29)** di bawah ini :

TABEL 2.1.b T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah dan
Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan (tahun 2024)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah th 2023 (n-2)	Ting kat Real isasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9			10 = 7+9		11 = (10/4)	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	3				KEPEGAWAIAN															
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase capaian kinerja program BKD	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	100	%	100
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	28	dokumen	57	dokumen	7	dokumen	7	dokumen	100	7	dokumen	14	dokumen	50
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang tersusun	28	dokumen	57	dokumen	7	dokumen	7	dokumen	100	7	dokumen	14	dokumen	50
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	jumlah laporan keuangan	48	laporan	72	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	24	laporan	50

					Daerah	yang disusun															
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	orang	34	orang	34	orang	34	orang	100	34	orang	34	orang	100	
5	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	dokumen	72	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100	12	dokumen	24	dokumen	50	
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Bintek,Sosialisasi dan workshop	12	laporan	15	laporan	3	laporan	3	laporan	100	3	laporan	6	laporan	50	
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	240	orang	471	orang	70	ASN	70	ASN	100	60	orang	130	orang	54,2	
5	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	480	orang	590	orang	165	ASN	165	ASN	100	120	orang	285	orang	59,4	
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	48	laporan	72	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	24	laporan	50	
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	36	paket	72	paket	12	paket	12	paket	100	9	paket	21	paket	58,33	

5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	paket	72	paket	12	paket	12	paket	100	10	paket	22	paket	44
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	paket	72	paket	12	paket	12	paket	100	5	paket	17	paket	85
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	paket	72	paket	12	paket	12	paket	100	5	paket	17	paket	85
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	200	dokumen	280	dokumen	40	dokumen	40	dokumen	100	50	dokumen	90	dokumen	45
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	laporan	72	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	24	laporan	50
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan operasional kantor	48	bulan	72	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	laporan	72	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	24	laporan	50
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	laporan	72	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	24	laporan	50
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	laporan	72	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	24	laporan	50

5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	laporan	72	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	24	laporan	50
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah	48	bulan	72	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	unit	23	unit	24	unit	24	unit	100	24	unit	24	unit	100
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Gedung	1	Gedung	1	gedung	1	gedung	100	1	Gedung	1	Gedung	100
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	100	%	100
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah laporan terlaksananya pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	48	laporan	72	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	24	laporan	50

5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	4	dokumen	5	dokumen	1	dok	1	dok	100	1	dokumen	2	dokumen	49,75
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	4	dokumen	7	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	2	dokumen	49,75
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	48	dokumen	72	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100	12	dokumen	24	dokumen	50
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	48	dokumen	72	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100	12	dokumen	24	dokumen	50
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	48	dokumen	72	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100	12	dokumen	24	dokumen	50
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah laporan terprosesnya Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN	48	laporan	72	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	24	laporan	50
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan mutasi Jabatan Pelaksana (JFU & JFT) antar Daerah	8	dokumen	13	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	2	dokumen	3	dokumen	37,5

5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	8	dokumen	13	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	2	dokumen	3	dokumen	37,5
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4	dokumen	7	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	2	dokumen	49,75
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN dan Fasilitas Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional	48	laporan	72	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	24	laporan	50
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	48	laporan	72	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	24	laporan	50
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	800	ASN	260	ASN	200	ASN	200	ASN	100	200	ASN	400	ASN	50
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase terlaksananya pemberian penghargaan bagi pegawai, pembinaan disiplin ASN dan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	200	%	200
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	600	ASN	755	ASN	195	ASN	195	PNS	100	150	ASN	345	ASN	57,5
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Laporan Pembinaan Disiplin	4	Laporan	7	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	2	Laporan	49,75

5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Penetapan Keputusan pembinaan kepegawaian dan kasus-kasus pelanggaran disiplin	48	laporan	72	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	24	laporan	50
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	200	%	200
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	4	laporan	6	laporan	1	laporan	1	laporan	100	1	laporan	2	laporan	49,75
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	320	ASN	4655	ASN	4337	PNS	4337	PNS	100	70	ASN	4407	ASN	1377,19
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan Latsar CPNS	861	ASN	1173	ASN	480	ASN	480	ASN	100	261	ASN	741	ASN	86,06

5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	12	laporan	15	laporan	3	laporan	3	laporan	100	3	laporan	6	laporan	50
---	---	---	------	---	---	--	----	---------	----	---------	---	---------	---	---------	------------	---	---------	---	---------	----

Dari tabel **Tabel 2.1.a. dan Tabel 2.1.b.** di atas terlihat bahwa realisasi program/kegiatan hampir semua target terpenuhi bahkan melampaui, hal ini didukung adanya komitmen bersama untuk senantiasa meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kepegawaian agar tercapai pelayanan kepegawaian yang terus meningkat tiap tahun.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang sebagai berikut :

1. Adanya Perubahan Kebijakan dan Regulasi pemerintah pusat/nasional dalam Manajemen ASN, hal ini dapat mempengaruhi strategi dan program yang telah direncanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang pada tahun berjalan;
2. Keterbatasan jumlah SDM Aparatur pengelola kepegawaian jika dibandingkan dengan ABK dan Peta Jabatan yang ada;
3. Komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian sangat diperlukan dalam Implementasi Merit Sistem secara optimal.

Dari identifikasi terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Setiap tahun, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Batang selalu berupaya maksimal untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan di bidang pengelolaan manajemen (administrasi) kepegawaian. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kualitas pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang secara bertahap mengalami peningkatan. Beberapa faktor pendukung adanya peningkatan kualitas pelayanan tersebut diantaranya :

1. Adanya jalinan kerjasama yang lebih intensif dengan institusi yang lain baik di bidang kepegawaian maupun non-kepegawaian.
2. Adanya peningkatan kualitas pelaksana tugas pokok dan fungsinya masing-masing
3. Adanya peningkatan fasilitas pendukung sarana/prasarana pengelolaan administrasi kepegawaian.
4. Adanya komitmen yang kuat secara bersama-sama untuk bergerak lebih dinamis dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang tahun 2023 dapat diketahui dari indikator-indikator pada **Tabel 2.2 (TC-30)** di bawah ini :

Tabel 2.2 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Batang

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan/ Analisis
				n-2	n-1	n	n+1	n-2	n-1	n	n+1	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai SAKIP BKD			68	69	70	71	78	79	80	98	Capaian tahun n-1 berdasarkan LHE AKIP Tahun 2023
2	Indek Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			85	86	87	89	87	88	89	90	Prediksi Capaian Survey kepuasan Layanan Kepegawaian di Semester 1
3	Persentase ASN dengan nilai Kinerja Kriteria "baik"			100	100	100	100	100	100	100	100	Prediksi capaian tahun n- 1 100% optimis dicapai
4	Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas			65	70	80	90	65	70	80	90	Prediksi capaian tahun n- 1 optimis dicapai

Selanjutnya gambaran keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2023 tampak pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.a.
Analisis Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Strategis Tahun 2023

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Perubahan	Realisasi	Pencapaian Kinerja
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah	Nilai SAKIP BKD	68	78	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian serta meningkatnya kedisiplinan ASN	Indek Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	85	88,15	100%
		Persentase ASN dengan nilai Kinerja Kriteria "baik"	100	100	100%
3	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya	Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas	65	100	100%
	Rata-rata Capaian Kinerja				100%

Pada tahun 2023 terdapat perubahan pada pengukuran kinerja, dimana telah ditentukan untuk capaian kinerja maksimal 100%, sehingga pengukuran capaian kinerja tahun 2023 sebagaimana tampak pada tabel di atas.

Dari **Tabel 2.2 (T-C.30)** di atas dapat diuraikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pada indikator Nilai SAKIP BKD pada tahun 2023 (n-2), nilai capaiannya adalah 100% dimana perolehan Nilai SAKIP tahun 2022 adalah 78 (BB/SANGAT BAIK) dari target yang ditetapkan sebesar 68.

Nilai SAKIP diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP oleh Inspektorat Daerah.

Dalam upaya pencapaian target kinerja indikator Nilai SAKIP BKD terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

- a. Tersedianya Rencana Aksi sebagai pedoman dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah;
- b. Komitmen Pimpinan dan SDM Aparatur dalam menerapkan dan memperkuat SAKIP pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang

Faktor Penghambat :

- a. Kurangnya pemahaman SDM Aparatur mengenai SAKIP
- b. Kualitas Data yang kurang baik, belum tersedia data yang up to date sesuai periode target kinerja yang ditentukan

Upaya-upaya atau solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Menindaklanjuti Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022 dengan optimal pada semua aspek penilaian.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dengan mengikutsertakan pelatihan Implementasi SAKIP

- c. Peningkatan Kualitas Data dengan melakukan Desk Capaian Kinerja Kegiatan setiap bulan dan metode pelaporan dengan googlespreadsheet
2. Indikator Indek Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, nilai capaiannya adalah 100%, dimana berdasarkan hasil Survey Layanan Kepegawaian Tahun 2023 diperoleh nilai 88 dari target yang ditetapkan sebesar 85.

Capaian sebesar **100 %** termasuk dalam kategori **Sangat Baik**, hal ini bisa menjadi tolak ukur bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian yang berjalan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang sudah memenuhi target kinerja yang ditentukan.

Dan pencapaian ini menjadi semangat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian ke depannya, demi memenuhi tantangan eksternal yang menuntut agar kualitas pelayanan administrasi kepegawaian semakin mengusung teknologi tepat guna yang dapat diaplikasikan untuk mempermudah proses pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, efisien, paperless dan tepat waktu.

Faktor Pendukung :

- a. Komitmen Pimpinan dan SDM Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pegawai dan pengguna layanan;
- b. Ketersediaan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait dengan prosedur, persyaratan, dan status administrasi kepegawaian
- c. Penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi yang efisien dalam mengelola data kepegawaian

Faktor Penghambat :

- a. Keterbatasan sumber daya(personil) layanan kepegawaian

- b. Belum adanya mekanisme yang efektif dalam penanganan aduan terhadap layanan kepegawaian
- c. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara berbagai bidang penyedia layanan terkait dengan administrasi kepegawaian sehingga menurunkan kualitas layanan

Upaya-upaya atau solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Mengusulkan kebutuhan formasi CPNS sesuai peta jabatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang untuk memenuhi kekurangan SDM layanan kepegawaian
- b. Menyusun SOP Layanan Aduan
- c. Meningkatkan sinergitas dan kekompakan antar bidang dengan evaluasi kinerja layanan tiap bulan

Pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dilakukan dengan cara mengirimkan Link Survey ner ke OPD Pemkab Batang, yang kemudian dari isian kuisisioner tersebut dilakukan perhitungan dengan **formulasi** sebagai berikut :

<i>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian =</i> (Total Nilai Persepsi Responden per Parameter : Total Parameter yang terisi) x (1/jumlah Parameter) x Nilai Dasar 25

3. Indikator Persentase ASN dengan nilai Kinerja Kriteria “baik”, nilai capaiannya adalah 100%, dimana realisasinya adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Pengukuran **Persentase ASN dengan nilai Kinerja Kriteria “baik” dan “sangat baik”** dilakukan dengan melakukan rekapitulasi Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2023 yang terkirim ke Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, dengan **formulasi** sebagai berikut :

Persentase ASN dengan nilai Kinerja Kriteria “baik” =

$$\frac{\text{Jumlah ASN Kab Batang yang memiliki Kinerja "baik": Jumlah ASN Kab. Batang}}{\text{Batang}} \times 100$$

Dalam upaya pencapaian target kinerja indikator Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria "Baik" terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

- a. Adanya kebijakan yang jelas dan standar penilaian kinerja yang terukur berdasarkan PerMenPANRB Nomor 6 Tahun 2022
- b. Kepemimpinan yang efektif dari Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Batang yang memberikan arahan yang jelas, dukungan, dan motivasi kepada ASN untuk mencapai standar kinerja yang tinggi.
- c. Tersedianya program pengembangan keterampilan dan pelatihan bagi ASN sehingga dapat meningkatkan kemampuan ASN untuk mencapai standar kinerja yang diharapkan

Faktor Penghambat :

- a. Budaya organisasi yang tidak mendorong kinerja tinggi atau bahkan menciptakan hambatan terhadap inovasi dan kolaborasi dapat menghambat kemampuan ASN untuk mencapai kinerja yang baik.
- b. Kurangnya pengawasan atau pengawasan yang tidak efektif atas kinerja ASN
- c. Kurangnya komunikasi yang efektif antara manajemen dan ASN serta kurangnya umpan balik tentang kinerja dapat menghambat kemampuan ASN untuk meningkatkan kinerja mereka.

Upaya-upaya atau solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas

adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya membangun budaya organisasi yang mendorong kinerja tinggi, kolaborasi, dan inovasi ASN
 - b. Memberikan penghargaan dan pengakuan atas pencapaian kinerja yang baik untuk memperkuat motivasi kinerja di setiap pelaksanaan Meeting Staf dalam bentuk pujian dan/atau apresiasi lainnya
 - c. Meningkatkan pengawasan dan sistem umpan balik untuk memastikan bahwa kinerja ASN terkelola dengan baik dan memenuhi standar yang diharapkan melalui evaluasi kinerja triwulanan
 - d. Meningkatkan komunikasi antara manajemen dan ASN, serta antara rekan kerja, untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan organisasi dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi
4. Indikator Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas dengan capaian 100%, dimana realisasinya adalah 100% dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 65%.

Dalam upaya pencapaian target kinerja indikator Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

- a. Tersedianya program dan dukungan anggaran bagi pengembangan SDM sesuai Analisa Kebutuhan Diklat di Kabupaten Batang
- b. Kerjasama dan kolaborasi efektif dengan Badan Diklat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan SDM

Faktor Penghambat :

- a. Kurangnya motivasi atau inisiatif dari pihak ASN sendiri untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang tugasnya
- b. Kurangnya program coaching dan mentoring sebagai alternatif pengembangan kompetensi di Tingkat Perangkat Daerah

Upaya-upaya atau solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pelatihan yang terarah dan sesuai dengan tujuan pengembangan karier masing-masing ASN berdasarkan Analisa Kebutuhan Diklat
- b. Mengadakan sosialisasi tentang coaching dan mentoring yang dapat diimplementasikan di perangkat daerah
- c. Mengimplementasikan aplikasi SI ELANG dan bintek online via zoom/youtube live sebagai sarana optimalisasi pengembangan kompetensi via daring

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang memiliki peran penting ialah sumber daya aparturnya. Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualitas dan komitmen dalam rangka tercapainya tujuan organisasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diperlukan Aparatur Sipil Negara sebagai unsur aparatur negara yang siap menjadi abdi masyarakat yang memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Analisis lingkungan baik intern maupun ekstern sangat penting bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah. Dengan

mengetahui kondisi di dalam maupun di luar perangkat daerah akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya Perubahan Kebijakan dan Regulasi pemerintah pusat/nasional dalam Manajemen ASN, hal ini dapat mempengaruhi strategi dan program yang telah direncanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang pada tahun berjalan;
2. Keterbatasan jumlah SDM Aparatur pengelola kepegawaian jika dibandingkan dengan ABK dan Peta Jabatan yang ada;
3. Komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian sangat diperlukan dalam Implementasi Merit Sistem secara optimal.

Adapun berdasarkan analisis lingkungan eksternal, yaitu proses identifikasi terhadap lingkungan di luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan yang ada meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya dan sebagainya, maka peluang dan tantangan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang, teridentifikasi sebagai berikut :

Peluang (Opportunity) :

1. Terbukanya komunikasi/koordinasi/konsultasi dengan institusi kepegawaian yang lain;
2. Terbukanya kesempatan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM melalui Pengiriman Diklat Teknis maupun Fungsional;
3. Terbukanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait di bidang aplikasi pengolahan data.

Tantangan (Threat) :

1. Tuntutan agar profesionalisme aparatur pelayanan lebih ditingkatkan;
2. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah membuka peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan manajemen ASN dengan basis sistem merit. Dengan kata lain, pendekatan tradisional yang menempatkan PNS sebagai alat kelengkapan birokrasi telah diubah dengan pendekatan moderen yang menempatkan PNS sebagai kunci penting dalam proses pembangunan nasional, hal ini menjadi tantangan terbesar bagi Badan Kepegawaian Daerah sebagai Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan Manajemen ASN di daerah.
3. Tuntutan agar kualitas pelayanan administrasi kepegawaian ditingkatkan melalui sistem pelayanan yang disesuaikan dengan teknologi tepat guna yang dapat diaplikasikan untuk mempermudah proses pelayanan administrasi kepegawaian.
4. Tuntutan agar proses-proses administrasi kepegawaian lebih cepat, efisien dan tepat waktu.

Dari uraian hambatan serta tantangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang di atas, tentunya berpengaruh terhadap capaian kinerja tahunan dan capaian renstra sebagaimana diuraikan dalam sub bab 2.2 di atas di mana untuk capaian tahun 2023 termasuk dalam kategori **sangat baik**, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala dalam pencapaian indikator program yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar perjanjian kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, selain itu harus dilaksanakan dengan komprehensif Sistem Pengendalian Intern agar tercapai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian di Kabupaten Batang dalam jangka menengah, maka dapat dihasilkan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2025 antara lain :

1. ***Grand Design* Manajemen ASN**

Grand design ini akan berisi *roadmap* dari setiap batasan waktu yang ditentukan sehingga dapat menjadi acuan program dan kegiatan bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang yang selaras antar unit kerja.

2. **Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja**

Penerapan manajemen berbasis kinerja diawali dengan penyusunan indikator-indikator aktivitas kerja yang terukur pada setiap posisi/jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Dalam pelaksanaannya, diperlukan sistem informasi manajemen berbasis kinerja yang terintegrasi dengan sistem *reward* and *punishment* yang jelas, sehingga akan terbentuk mekanisme kerja yang terukur dan sesuai dengan kontrak kinerja yang menjadi target pencapaian masing-masing SKPD.

3. **Internalisasi Budaya Organisasi**

Bukan hanya sekadar slogan, tetapi menjadi akar yang tertanam kuat dalam budaya kerja aparatur sipil negara (ASN). Hal inilah

yang diharapkan dengan adanya satu *core values* (nilai-nilai dasar) ASN yang selaras bagi seluruh instansi pemerintah, yaitu BerAKHLAK.

BerAKHLAK menyarikan dan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang ada dalam UU No. 5/2014 tentang ASN serta arahan Presiden RI Joko Widodo yang sering menekankan pentingnya pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut dikerucutkan menjadi tujuh nilai yang berlaku bagi ASN secara umum, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Dengan adanya satu *core values* juga akan memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika melakukan mobilitas antar-instansi pemerintah. ASN tidak perlu menyesuaikan diri lagi dengan *core values* baru di instansi yang dituju karena sudah ada panduan perilaku yang berlaku secara umum untuk ASN di mana pun dia bertugas.

4. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Batang

Secara kualitas, pembangunan sumber daya manusia aparatur sejalan dengan reformasi birokrasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing aparatur negara dalam mengimplementasikan program-program pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk menghasilkan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang unggul, dinamis, dan sesuai dengan tuntutan kondisi pembangunan, maka diperlukan perubahan paradigma manajemen kepegawaian yang sebelumnya lebih menekankan kepada hak dan kewajiban individual pegawai ke arah perspektif baru yang lebih menekankan kepada manajemen pengembangan sumber daya manusia yang strategis (*strategic*

humanresource management).

Pencapaian tujuan ini harus didukung oleh SDM aparatur yang profesional, berintegritas, jujur, berkinerja tinggi dan akuntabel, sehingga mampu merespon dengan cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan strategis yang berorientasi kepada masyarakat. Selain itu, Reformasi Birokrasi ditujukan untuk penyempurnaan sistem manajemen ASN yang dapat memacu peningkatan profesionalisme, integritas, jujur, berkinerja tinggi, netral, akuntabel dan sejahtera serta yang dapat memacu produktivitas kerja aparatur. Pengembangan SDM Aparatur ini mencakup sistem pelatihan dan pengembangan yang diawali dengan Penyusunan Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat dan Pengembangan Kompetensi ASN.

5. Pengelolaan Database kepegawaian yang akurat dan up todate

Informasi yang relevan, akurat, lengkap dan tepat dapat diperoleh dengan mengoptimalkan penggunaan sistem dan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

- (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;

(2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Tersedianya sistem informasi Kepegawaian terpadu yang memungkinkan akses data dan informasi kepegawaian secara lengkap, akurat, dan terkini adalah bahan pengambilan keputusan untuk mendukung peningkatan pelayanan terhadap pegawai.

6. Pembangunan Assessment Center (Pusat Penilaian Kompetensi) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam rangka menindaklanjuti Amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya dalam hal pengembangan karier ASN dan Manajemen Talenta, Pemerintah Kabupaten Batang melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang diharapkan dapat membangun Pusat Penilaian Kompetensi (Assesment Center) mandiri sehingga dapat mengefisiensi anggaran pelaksanaan penilaian kompetensi yang selama ini dilaksanakan berkerja sama dengan Provinsi lain maupun dengan lembaga lainnya.

Assessment Center dapat membantu meningkatkan kualitas dan konsistensi dalam mengevaluasi kompetensi ASN. Dengan metode evaluasi yang lebih objektif dan terstruktur, hasil evaluasi dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan dan potensi ASN.

Penggunaan Assessment Center dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan ASN. Kriteria evaluasi yang jelas dan terukur dapat membantu mengurangi subjektivitas dan nepotisme dalam pengambilan keputusan terkait promosi dan penugasan.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Sebagai perwujudan dari tindak lanjut beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Penyusunan RKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Tabel Review rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Batang terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dapat kami sajikan dalam **Tabel 2.4 (TC-31)** berikut :

Tabel 2.4 (TC-31)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Akhir RKPD				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	target capaian kinerja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	target capaian kinerja	Pagu Indikatif	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
KEPEGAWAIAN				6.688.845.530	KEPEGAWAIAN				6.688.845.530	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase capaian kinerja program BKD		4.779.225.183	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KO TA		Persentase capaian kinerja program BKD		4.779.225.183	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		25.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		25.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang tersusun	7 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang tersusun	7 Laporan	25.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		jumlah laporan keuangan yang disusun		3.391.237.133	Administrasi Keuangan Perangkat		jumlah laporan keuangan yang disusun		3.391.237.133	

					Daerah					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.367.777.133	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.367.777.133	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	23.460.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	23.460.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan pelaksanaan Bintek, Sosialisasi dan workshop		187.218.650	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan pelaksanaan Bintek, Sosialisasi dan workshop		187.218.650	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	34.635.400	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	34.635.400	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	152583250	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	152.583.250	Sesuai Kebutuhan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tahun 2025
Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan		430.318.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan		430.318.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9 paket	14.746.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9 paket	14.746.000	Penyesuaian terhadap standarisasi harga satuan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	115.694.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	115.694.500	Penganggaran pengadaan barang sesuai Usulan Kebutuhan Barang Tahun 2024
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	94.920.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	94.920.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	46.888.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	46.888.600	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50 Dokumen	9.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50 Dokumen	9.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	149.068.900	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	149.068.900	Penyesuaian terhadap standarisasi harga satuan dan kebutuhan anggaran perjalanan dinas
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		cakupan layanan operasional kantor		427.896.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		cakupan layanan operasional kantor		427.896.400	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.113.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.113.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	243.137.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	243.137.700	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	45.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	45.000.000	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	137.645.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	137.645.700	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah		317.555.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah		317.555.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	189.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	189.800.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	127.755.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	127.755.000	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu		1.909.620.347	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu		1.909.620.347	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah laporan terlaksananya pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		741.366.107	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah laporan terlaksananya pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		741.366.107	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	1 Dokumen	26.862.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah	1 Dokumen	26.862.000	

		Pelaksanaan Pengadaan ASN			Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKD	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	465.859.117	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKD	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	465.859.117	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKD	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen	67.637.360	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKD	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen	67.637.360	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	107.007.790	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	107.007.790	
Pengelolaan Data Kepegawaian	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	73.999.840	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	73.999.840	
Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah laporan terprosesnya Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN		655.941.000	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah laporan terprosesnya Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN		655.941.000	
Pengelolaan Mutasi ASN	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan mutasi Jabatan Pelaksana (JFU & JFT) antar Daerah	2 Dokumen	27.620.000	Pengelolaan Mutasi ASN	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan mutasi Jabatan Pelaksana (JFU & JFT) antar Daerah	2 Dokumen	27.620.000	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKD	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	37.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKD	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	37.000.000	
Pengelolaan Promosi ASN	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	591.321.000	Pengelolaan Promosi ASN	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	591.321.000	

Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN dan Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		132.575.840	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN dan Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		132.575.840	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKD	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	12 Laporan	51.555.840	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKD	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	12 Laporan	51.555.840	
Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKD	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	81.020.000	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKD	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	81.020.000	Penyesuaian terhadap standarisasi harga satuan
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase terlaksananya pemberian penghargaan bagi pegawai, pembinaan disiplin ASN dan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN		379.737.400	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase terlaksananya pemberian penghargaan bagi pegawai, pembinaan disiplin ASN dan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN		379.737.400	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKD	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	168.702.200	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKD	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	168.702.200	
Pembinaan Disiplin ASN	BKD	Jumlah Laporan Pembinaan Disiplin	1 Laporan	119.865.200	Pembinaan Disiplin ASN	BKD	Jumlah Laporan Pembinaan Disiplin	1 Laporan	119.865.200	

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKD	Jumlah Laporan Penetapan Keputusan pembinaan kepegawaian dan kasus-kasus pelanggaran disiplin	12 Laporan	91.170.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKD	Jumlah Laporan Penetapan Keputusan pembinaan kepegawaian dan kasus-kasus pelanggaran disiplin	12 Laporan	91.170.000	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.003.356.750	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.003.356.750	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target		1.003.356.750	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target		1.003.356.750	
Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah Laporan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis		117.031.150	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah Laporan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis		117.031.150	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKD	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	60 Orang	117.031.150	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKD	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	60 Orang	117.031.150	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan		886.325.600	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan		886.325.600	

		Latsar CPNS					Latsar CPNS			
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	886.325.600	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	886.325.600	Penyesuaian dalam rangka kebutuhan Orientasi PPPK
TOTAL				7.692.202.280					7.692.202.280	

Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD dilakukan melalui identifikasi program atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam Rancangan Akhir RKPD dengan analisis kebutuhan. Hasil reviu dapat dilihat pada tabel 2.4 dan dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan pagu indikatif dibandingkan dengan Pagu APBD Tahun 2024 dari beberapa sub kegiatan sesuai evaluasi pelaksanaan sub kegiatan tahun sebelumnya dan penyesuaian terhadap Standarisasi Harga Satuan Tahun 2025.
2. Pagu indikatif diutamakan untuk program dan kegiatan prioritas sesuai dengan isu-isu strategis pelaksanaan tusi kepegawaian dan diklat dalam rangka implementasi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain : 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut

diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang sebagai Perangkat Daerah (PD) yang melayani administrasi kepegawaian ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang selalu berupaya maksimal untuk mengusulkan program-program dan kegiatan yang mendukung peningkatan pelayanan manajemen kepegawaian. Usulan ini disampaikan melalui forum Perangkat Daerah (PD) pada proses perencanaan pembangunan daerah, yang difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Batang. Pada penyusunan RKPD 2025 ini, tidak terdapat Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat maupun dari Para Pemangku Kepentingan.

Tabel 2.5 (TC-32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 BKD Kabupaten Batang

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	-	-	-	-	-
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pencapaian visi dan misi RPJP Nasional 2025 dengan prioritas agenda pembangunan difokuskan pada pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan penekanan pada upaya :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Perkembangan kemampuan ilmu dan teknologi; dan
3. Penguatan daya saing perekonomian.

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempunyai hubungan fungsional dan profesional baik langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ada di pusat, maupun dengan kantor-kantor regional Badan Kepegawaian Negara yang tersebar pada delapan wilayah kerja.

Pemerintah Pusat telah menetapkan beberapa kebijakan- kebijakan dalam rangka menata manajemen kepegawaian pada pemerintahan daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan terwujudnya SMART ASN, yaitu ASN sebagai human capital yang profesional, handal, berintegritas, sejahtera dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik sebagaimana diamanatkan pada Nawa Cita. Salah satu kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan adalah penyusunan roadmap Aparatur Sipil Negara pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3621/M.PANRB/10/2016 tanggal 3 November 2016, pokok- pokok substansi dari Roadmap ASN 2017-2019 dan 2020-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.a.
Pokok-Pokok Substansi Roadmap ASN

No	Kegiatan	Rencana Aksi
1	Perencanaan kebutuhan, penataan jumlah, jabatan, dan distribusi ASN	a. Perumusan kebutuhan ASN lebih tajam lagi dengan mengacu pada RPJMN ke-3, Nawacita, dan RPJMN ke-4, serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Pemda), sehingga rumusan kebutuhan ASN terhubung dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan strategis negara. b. Perumusan rencana kebutuhan ASN khususnya bagi pemerintahan daerah memperhatikan keunikan arah pengembangan daerah masing-masing, untuk menopang keunggulan nasional. c. Penuangan kebutuhan jabatan di atas didasarkan pada analisa jabatan, yaitu jabatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. d. Penajaman perhitungan analisa beban kerja (ABK), didasarkan pada jumlah dan jenis jabatan yang tepat, sehingga tergambar kelebihan atau kekurangan pegawai berdasarkan jabatan yang

		dibutuhkan. Jenis jabatan yang dimaksud adalah jabatan fungsional, jabatan administrasi, dan jabatan p e. Penyusunan rencana distribusi ASN dalam peta jabatan yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. f. Penyempurnaan dan/atau perbaikan perencanaan melalui e-formasi berdasarkan penajaman Rancangan Renja BKD Kabupaten Batang Tahun 2021 perencanaan kebutuhan dan analisis jabatan, dan peta jabatan.
2	Audit atau assesment, perencanaan pengembangan karir, pola karir, promosi, dan mutasi ASN	a. Perumusan dan pelaksanaan asesment kompetensi dan kinerja ASN b. Perumusan rencana pengembangan karir berdasarkan data pada e-Formasi. c. Perumusan rencana pengembangan kompetensi ASN didasarkan pada analisa kebutuhan diklat dengan menekankan linkage kebutuhan strategis organisasi. d. Perumusan sistem pengembangan kapasitas kepemimpinan pada seluruh level manajerial. e. Perumusan konsep dan rencana pola karir ASN untuk mendukung kebutuhan strategis organisasi. f. Perumusan konsep promosi menuju jabatan pimpinan tinggi g. Perumusan konsep peralihan beberapa jabatan Administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) ke jabatan Fungsional. h. Penetapan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan organisasi. i. Perumusan kriteria Smart ASN pada masing-masing K/L dan pemda secara spesifik sesuai kebutuhan strategis organisasi.

3	Penilaian kinerja, pengajian dan tunjangan, penghargaan, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua	a. Perumusan manajemen kinerja berupa penetapan kinerja sesuai kebutuhan strategis organisasi, serta proses menurunkan (cascading) penetapan kinerja hingga ke seluruh ASN. b. Perumusan konsep pemberian tunjangan kinerja dan penghargaan dihubungkan dengan tingkat capaian kinerja. c. Perumusan konsep yang unik dalam memberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
4	Disiplin dan integritas	a. Pendataan dan pemetaan kondisi dan tingkat disiplin dan integritas ASN pada organisasi masing-masing. b. Perumusan rencana peningkatan disiplin dan integritas ASN, sehingga semakin mendukung pencapaian tujuan organisasi. c. Kondisi penjatuhan hukuman disiplin yang tegas dan penegakan integritas ASN.

Dari pokok-pokok roadmap ASN di atas terdapat beberapa kegiatan yang perlu untuk segera di tindaklanjuti, diantaranya penyusunan Analisis Jabatan, Analisis beban kerja, dan Evaluasi Jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan pelaksana, Pelaksanaan assesment dan perencanaan pengembangan karir, pola karir, promosi, dan mutasi ASN, Penilaian Kinerja, Penyusunan regulasi tentang tunjangan kinerja, penghargaan kepada ASN, Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, penegakan disiplin dan integritas ASN.

Selain hal tersebut di atas, dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang E-Government dan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas-tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pemanfaatan sistem informasi berbasis aplikasi sangat dibutuhkan, sehingga akan

tercipta efektifitas dan efisiensi dalam mengelola administrasi kepegawaian di Kabupaten Batang diantaranya SIMPEG, E-Formasi, dan E-Kinerja dalam rangka memberi pelayanan yang maksimal kepada para aparatur sipil negara.

Pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian di daerah harus selalu selaras mengikuti kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Adapun beberapa peraturan dan kebijakan baru di bidang kepegawaian semakin memberikan tantangan bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan manajemen kepegawaian yang benar dan terarah.

Selain itu, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 harus disinkronkan dan bersinergi dengan Renstra K/L atau Renstra Badan Kepegawaian yang berada di level atasnya, seperti Renstra Badan Kepegawaian Negara dan Renstra BKD Propinsi Jawa Tengah, Sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BKN Tahun 2020-2025, BKN mempunyai visi yaitu Mewujudkan pengelola ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Hal tersebut sejalan dengan dan sinergi dengan **Tujuan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026**, yaitu :

1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah , dengan Indikator : Nilai SAKIP BKD

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah, dengan Indikator : Nilai Sistem Merit.

Tabel 3.1.b
Telaah Renstra K/L , Renstra Provinsi, Renstra/ Renja PD

No	Renstra K/L, Renstra Provinsi, Renstra Kabupaten/Kota dan Renja PD	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Renstra K/L: Fokus sasaran yang akan dicapai oleh BKN adalah penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang professional dan bermartabat	BKD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.	Terkait dengan renstra K/L tidak ada permasalahan karena tujuan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu Terwujudnya penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN telah selaras dengan sasaran Renstra K/L (BKN) dalam implementasi Sistem Merit. kemudian pada renstra Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Batang juga telah sinkron , dimana tertuang dalam Tujuan perangkat daerah yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah dengan Indikator Tujuan : Nilai Sistem Merit	Faktor Penghambat Penerapan Sistem Merit pada Kabupaten/Kota: Belum diterapkannya secara Optimal penilaian Sistem Merit sebagai benchmark capaian awal nilai Merit pada Kab/Kota

2	Renstra Provinsi : Fokus sasaran yang akan dicapai oleh BKD Provinsi Jawa Tengah yaitu terwujudnya penyelenggaraan Sistem Merit dalam manajemen ASN.	Terkait dengan Renstra Provinsi Jawa Tengah, renstra Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Batang juga telah sinkron , dimana tertuang dalam Tujuan perangkat daerah yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah dengan Indikator Tujuan : Nilai Sistem Merit	- Faktor Pendorong : Telah diterbitkan Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B497/KASN/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Survei Pemetaan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN dimana 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah akan menjadi lokus pemetaan tingkat penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan pemerintah
---	---	---	---

3	Renstra /Renja BKD Kabupaten Batang : Fokus sasaran yang akan dicapai Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah, Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian serta meningkatnya kedisiplinan ASN , dan Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya			
---	--	--	--	--

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah (PD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang sebagai unsur penunjang pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 di bawah ini :

Tujuan ke-2 : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel,

- Sasaran :
- a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)

Selaras dengan Tujuan ke-2 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 di atas, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang menetapkan **Tujuan Strategis Jangka Menengah** yaitu :

1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah

Dalam rangka mencapai Tujuan Strategis Jangka Menengah di atas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang telah menetapkan **3 (tiga) Sasaran Strategis** sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan

Kepegawaian Daerah

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian serta meningkatnya kedisiplinan ASN
3. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.

Tabel 3.2.a
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang

A. Tujuan : Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah							Target RPD/ Renstra
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator Kinerja	Target per Tahun				
			2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah	Nilai SAKIP BKD	- Formulasi : Nilai SAKIP BKD Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah - Tipe Perhitungan: non kumulatif - Sumber Data : LHE SAKIP dari Inspektorat	68	69	70	71	71
B. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah							
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian serta meningkatnya kedisiplinan ASN	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	- Formulasi: (Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter : Total Parameter Yang Terisi) x (1/jumlah parameter) x Nilai Dasar 25 - Tipe Perhitungan: non kumulatif	85	86	87	89	89
		- Sumber Data: Laporan Survey Kepuasan Masyarakat					

	Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria "baik"	- Formulasi: (Jumlah ASN Kab Batang yang memiliki Kinerja "baik" : Jumlah ASN Kab. Batang) x 100 - Tipe Perhitungan: non kumulatif - Sumber Data: Rekapitulasi SKP ASN Kab Batang	100	100	100	100	100
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya	Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas	- Formulasi: (Jumlah realisasi ASN yg dilatih : Jumlah Pendaftar Pelatihan) x 100 - Tipe Perhitungan: non kumulatif - Sumber Data: Realisasi Pelaksanaan Pengembangan SDM Tahun Berjalan	65	70	80	90	90

Selanjutnya dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang merumuskan strategi dan arah kebijakan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, strategi yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang juga harus disesuaikan dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Batang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Penetapan strategi dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut :

1. *Strenghts- Opportunities Strategy*(SO), yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.
2. *Weakness- Opportunities Strategy*(WO), yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal.
3. *Strengts - Threats Strategy* (ST), yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal.
4. *Weakness - Treaths Strategy* (WT), yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Tabel 3.2.b
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah ke -1 : Nilai SAKIP BKD	Sasaran PD ke-1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah	Nilai SAKIP BKD	Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja melalui penguatan kebijakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
					Perbaikan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Indikator Tujuan Perangkat Daerah ke -2 : Nilai Merit Sistem	Sasaran PD ke-2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian serta meningkatnya kedisiplinan ASN	Indeks Kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Penerapan Sistem Pelayanan Kepegawaian berbasis teknologi	Penguatan penerapan e-Services dan pemenuhan standar pelayanan publik

Aparatur Pemerintah					Monitoring dan evaluasi terkait Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kepegawaian
					Penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta
					Mengembangkan sistem manajemen kinerjaASN
					Penetapan indikator aktivitas kerja terukur sesuai dengan level jabatan(cascading kinerja)
					Sistem reward dan punishment yang terintegrasi melalui e-kinerja
					Penyusunan kebijakan dan pengiriman ASN mengikuti pengembangan kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural
		Sasaran PD ke- 3. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya	Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas	Peningkatan kualitas ASN yang berintegritas dan berkompetensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya	

3.3 Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang pada Tahun 2025 merupakan perincian dari Program dan Kegiatan sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, sebagaimana Lampiran Tabel 3.3 (T-C.33) berikut ini :

Tabel 3.3 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi/Kabupaten/Kota : Jawa Tengah / Batang
Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Targ et Capa ian Kiner ja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Kelu aran Sub Kegia tan				Tolok Ukur	Target	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				7.692.202.280,00					8.219.675.062,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.597.282.280,00					8.124.675.062,00
5	03				KEPEGAWAIAN				6.593.925.530,00					7.019.675.062,00
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.684.305.183,00					4.773.037.862,00
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.000.000,00					25.250.000,00
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Batang, Batang, Kauman	27 Laporan	25.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	25.250.000,00
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.391.237.133,00					3.425.149.504,00
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Batang, Batang, Kauman	30 Orang/bulan	3.367.777.133,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.401.454.904,00
5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Batang, Batang, Kauman	12 Dokumen	23.460.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa n Tugas ASN	12 Dokumen	23.694.600,00
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			187.218.650,00					194.981.754,00
5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Batang, Batang, Kauman	60 Orang	34.635.400,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	34.981.754,00
5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Batang, Batang, Kauman	165 Orang	152.583.250,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165 Orang	160.000.000,00
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			430.318.000					442.897.904

5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Batang, Batang, Kauman	9 Paket	14.746.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	14.897.904,00
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Batang, Batang, Kauman	5 Paket	115.694.500,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	117.000.000,00
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Batang, Batang, Kauman	5 Paket	94.920.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	95.000.000,00
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Batang, Batang, Kauman	5 Paket	46.888.600,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	47.000.000,00
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Batang, Batang, Kauman	12 Dokumen	9.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.000.000,00
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Batang, Batang, Kauman	12 Laporan	149.068.900,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	160.000.000,00
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			427.896.400,00					434.758.700,00

5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Batang, Batang, Kauman	12 Laporan	2.113.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.113.000,00
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Batang, Batang, Kauman	12 Laporan	243.137.700,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000,00
5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Batang, Batang, Kauman	12 Laporan	45.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Batang, Batang, Kauman	12 Laporan	137.645.700,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	137.645.700,00
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			317.555.000,00					345.000.000,00
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Batang, Batang, Kauman	29 Unit	189.800.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	195.000.000,00
5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Batang, Batang, Kauman	1 Unit	127.755.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			1.909.620.347,00					2.246.637.200,00
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			741.366.107,00					1.036.637.200,00
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN								
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Batang, Batang, Kauman	1 Dokumen	26.862.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	35.000.000,00
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK								

						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Batang, Batang, Kauman	1 Dokumen	465.859.117,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	750.000.000,00
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian									
						Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Batang, Batang, Kauman	1 Dokumen	67.637.360,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	67.637.360,00
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Batang, Batang, Kauman	12 Dokumen	107.007.790,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	110.000.000,00

5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Batang, Batang, Kauman	12 Dokumen	73.999.840,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Data Kepegawai an	12 Dokume n	73.999.840,00
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				655.941.000,00					670.000.000,00
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN									
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Batang, Batang, Kauman	12 Dokumen	27.620.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administra si, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	12 Dokume n	30.000.000,00
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Batang, Batang, Kauman	2 Dokumen	37.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi		Jumlah Pengelolaa n Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokume n	40.000.000,00

										Umum				
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Batang, Batang, Kauman	1 Dokumen	591.321.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Promosi ASN	1 Dokume n	600.000.000,00
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				132.575.840,00					153.000.000,00
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Batang, Batang, Kauman	100 Orang	51.555.840,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Mendapatk an Pendidikan Lanjutan	100 Orang	70.000.000,00
5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional									
						Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Kab. Batang, Batang, Kauman	10 Orang	81.020.000,00	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatk an Layanan Pengemba ngan Karir	10 Orang	83.000.000,00
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				379.737.400,00					387.000.000,00

5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									
						Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Batang, Batang, Kauman	100 Orang	168.702.200,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	170.000.000,00
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN									
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kab. Batang, Batang, Kauman	2500 Orang	119.865.200,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	2500 Orang	125.000.000,00
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Batang, Batang, Kauman	12 Laporan	91.170.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	92.000.000,00
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.003.356.750,00					1.105.000.000,00
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1.003.356.750,00					1.105.000.000,00
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				117.031.150,00					125.000.000,00
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi									

					Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
						Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Batang, Batang, Kauman	60 Orang	117.031.150,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	60 Orang	125.000.000,00
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				886.325.600,00					980.000.000,00
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Batang, Batang, Kauman	4 Laporan	886.325.600,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpi	4 Laporan	980.000.000,00

												nan, dan Prajabatan		
TOTAL										7.692.202.280				8.219.675.062

Dari tabel 3.3 (T-C.33) di atas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rumusan nomenklatur dan jenis program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD;
2. Terdapat perubahan pagu indikatif dibandingkan dengan Pagu APBD Tahun 2024 dari beberapa sub kegiatan, hal ini menyesuaikan dengan evaluasi pelaksanaan sub kegiatan tahun sebelumnya dan perhitungan ulang perencanaan, sehingga diharapkan lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan pencapaian target kinerja.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang, Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Rencana Kerja dan Pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Pada tahun 2025, jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang adalah sebesar Rp. **7.692.202.280,-** yang tersusun dalam 3 Program, 12 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Batang
Tahun 2025
Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian kinerja dan Rencana Pendanaan				Nasional	Prioritas Daerah	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							target 2025	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			7.692.202.280,00							8.219.675.062,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.597.282.280,00							8.124.675.062,00
5	03				KEPEGAWAIAN			6.593.925.530,00							7.019.675.062,00
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.684.305.183,00							4.773.037.862,00
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000.000,00							25.250.000,00
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27 Laporan	25.250.000,00
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.391.237.133,00							3.425.149.504,00
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.367.777.133,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 Orang/bulan	3.401.454.904,00
5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	23.460.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	23.694.600,00
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		187.218.650,00							194.981.754,00
5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									

					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	34.635.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60 Orang	34.981.754,00
5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165 Orang	152.583.250,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				165 Orang	160.000.000,00
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		430.318.000							442.897.904
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	14.746.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9 Paket	14.897.904,00
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	115.694.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Paket	117.000.000,00

X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	94.920.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Paket	95.000.000,00
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	46.888.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Paket	47.000.000,00
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	9.000.000,00
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	149.068.900,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	160.000.000,00
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			427.896.400,00							434.758.700,00
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.113.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	2.113.000,00
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	243.137.700,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	250.000.000,00
5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	45.000.000,00
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	137.645.700,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	137.645.700,00
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		317.555.000,00							345.000.000,00

					Daerah										
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	189.800.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				29 Unit	195.000.000,00
5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	127.755.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	150.000.000,00
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			1.909.620.347,00							2.246.637.200,00
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			741.366.107,00							1.036.637.200,00
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN										

					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	26.862.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1 Dokumen	35.000.000,00
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK										
					Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	465.859.117,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1 Dokumen	750.000.000,00
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian										
					Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	67.637.360,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1 Dokumen	67.637.360,00
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian										

					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	107.007.790,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	110.000.000,00
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian									
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	73.999.840,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	73.999.840,00
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN		655.941.000,00							670.000.000,00
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN									
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	12 Dokumen	27.620.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	30.000.000,00
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	37.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	40.000.000,00

5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	591.321.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	600.000.000,00
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			132.575.840,00							153.000.000,00
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN										
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang	51.555.840,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Orang	70.000.000,00
5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional										
						Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10 Orang	81.020.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Orang	83.000.000,00
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			379.737.400,00							387.000.000,00
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai										
						Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	168.702.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Orang	170.000.000,00
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN										

					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	2500 Orang	119.865.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2500 Orang	125.000.000,00
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	91.170.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	92.000.000,00
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		1.003.356.750,00							1.105.000.000,00
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		1.003.356.750,00							1.105.000.000,00
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis		117.031.150,00							125.000.000,00
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
					Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	60 ang	117.031.150,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60 Orang	125.000.000,00
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		886.325.600,00							980.000.000,00
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									

					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggar aan Pengembang an Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpin an, dan Prajabatan	4 Laporan	886.325.600,00		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Laporan	980.000.000,00
TOTAL							7.692.202.280,00							8.219.675.062,00

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023-2026 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 khususnya dalam rangka mendukung terwujudnya salah satu **Tujuan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu “Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel”** dengan **Sasaran “Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” dan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)”**.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang tahun 2025 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 dan selanjutnya Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun

2025.

Berdasarkan analisa program dan kebutuhan anggaran, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang tahun 2025 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 7.692.202.280,- yang terinci dalam 3 Program, 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Harapannya, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang tahun 2023-2026 dan sejalan dengan arah implementasi program unggulan Gubernur Jawa Tengah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi dan memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan, dan terintegrasi.

Demikian semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 ini nantinya dapat memberikan gambaran dan kontribusi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2025.

Batang, 8 Juli 2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah



DWI PRIYANTO, A.P., M.M.

NIP. 197607101996021004